



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOALEMO**

RENCANA STRATEGIS

BPS KABUPATEN BOALEMO

Tahun 2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS
BPS KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2020 – 2024

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: viii + 65 halaman

Naskah: BPS Kabupaten Boalemo

Penyunting: BPS Kabupaten Boalemo

Gambar Kover: BPS Kabupaten Boalemo (*credit to canva.com*)

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Salah satu kunci keberhasilan perencanaan adalah tersedianya data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas merupakan rujukan bagi semua pihak dalam merumuskan kebijakan, melakukan pengawasan, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai target.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024 merupakan rencana pembangunan di bidang statistik di wilayah Kabupaten Boalemo selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis dirumuskan untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi seluruh jajaran BPS Kabupaten Boalemo dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang telah ditetapkan.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Tahun 2020 – 2024. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Boalemo, Juli 2020

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Boalemo



Awaluddin Kurusi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN	3
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK	9
2.1 VISI BPS KABUPATEN BOALEMO	9
2.2 MISI BPS KABUPATEN BOALEMO	10
2.3 TUJUAN BPS KABUPATEN BOALEMO	12
2.4 SASARAN STRATEGIS BPS KABUPATEN BOALEMO	15
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	21
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS	21
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS KABUPATEN BOALEMO	37
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	39
4.1 TARGET KINERJA BPS KABUPATEN BOALEMO	39
4.2 KERANGKA PENDANAAN	42
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024.....	13
Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2020 - 2024	39
Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Interlink antara Sistem dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik ... 25

DAFTAR LAMPIRAN

Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo.....49

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan BPS Kabupaten Boalemo untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tersebut didasarkan pada Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020 – 2024 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perencanaan merupakan titik awal untuk menentukan arah strategis kebijakan melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Data dan informasi yang andal dan dapat dipercaya akan menjadi acuan yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan, monitoring, dan evaluasi program dalam rangka mencapai rencana yang efektif dan efisien. Bagi BPS Kabupaten Boalemo, rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan *outcome* dan *output* merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan *performance based budgeting*.

Muatan Renstra BPS Kabupaten Boalemo meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPS yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPS dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Substansi pada Renstra BPS Kabupaten Boalemo 2020 – 2024 harus disesuaikan dengan RPJMN 2020 – 2024, termasuk sasaran pokok RPJMN 2020 – 2024 yang terintegrasi menjadi sasaran Renstra BPS.

1.1 KONDISI UMUM

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik dan amanat UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional (SSN). Tujuan diterbitkannya SK Kepala BPS tersebut antara lain:

1. agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal;
2. menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara statistik; dan
3. agar tercipta suatu Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien.

Salah satu upaya BPS Kabupaten Boalemo untuk mewujudkan SSN antara lain melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dan masyarakat. Selama periode Renstra 2015 – 2019, berbagai kegiatan kerjasama dan hubungan antar instansi pemerintah dan lembaga lain telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan BPS Kabupaten Boalemo dengan pemerintah daerah, jumlah pengunjung website yang meningkat tiap tahun, keikutsertaan BPS dalam acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan diselenggarakannya sosialisasi berbagai kegiatan statistik.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi statistik tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Upaya yang telah dilakukan dalam memenuhi kebutuhan tersebut adalah:

1. melakukan update tabel statis dan dinamis dalam website resmi BPS Kabupaten Boalemo;
2. meningkatkan frekuensi penyampaian infografis melalui media sosial;
3. memperluas sarana komunikasi bagi pengguna data, termasuk melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp.

Pengguna data dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan BPS Kabupaten Boalemo melalui Survei Kebutuhan Data (SKD). SKD dilaksanakan setiap tahun dengan menargetkan pengguna data BPS sebagai sampel, baik yang datang langsung ke maupun tidak langsung. Pengguna data yang datang langsung adalah mereka yang memperoleh layanan dengan datang langsung ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Kabupaten Boalemo. Sedangkan pengguna data tidak langsung adalah mereka yang memperoleh pelayanan BPS melalui media komunikasi tidak langsung seperti e-mail, surat, telepon, maupun website.

Hasil SKD tahun 2019 terhadap sampel dari BPS Kabupaten Boalemo menunjukkan bahwa 100 persen pengguna data puas terhadap kualitas data BPS dan 90 persen

pengguna data merasa puas terhadap layanan data BPS. Sementara itu, 75,76 persen pengguna data menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional dan 90 persen pengguna data menjadikan data BPS sebagai rujukan utama. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan pengguna data terhadap BPS relatif tinggi.

BPS Kabupaten Boalemo sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan berbagai agenda rutin dan *ad hoc*. Beberapa kegiatan tersebut di antaranya adalah kegiatan prioritas nasional seperti Survei Wisatawan Nusantara, Pendataan Potensi Desa (PODES), Survei Ubinan untuk menghasilkan statistik tanaman pangan, Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), Sensus Ekonomi, Survei Penyusunan Disagregasi PMTB, dan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area (KSA). Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS Kabupaten Boalemo secara intensif guna mencegah pemborosan sumber daya. Pengawasan dilakukan dengan meningkatkan pembinaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan dan barang dalam rangka mendukung upaya BPS Kabupaten Boalemo sebagai lembaga tertib administrasi. Upaya yang dilakukan selama ini telah menghasilkan capaian di antaranya:

1. Penghargaan dari Kepala BPS sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan BPS tahun 2019;
2. Penghargaan dari Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Gorontalo sebagai Terbaik Kedua Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Kecil dalam ajang Treasury Awards 2019; dan
3. Peringkat dua dalam hal Pengelolaan dan Wasdal Barang Milik Negara tahun 2015 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Kondisi sosial, geografis, infrastruktur, maupun sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Boalemo menjadi beberapa hal yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan tugas pemerintahan bidang statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Boalemo. Hal-hal di atas dapat menjadi potensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan

data kepada konsumen BPS, namun dapat juga menjadi permasalahan dalam menghasilkan data yang berkualitas. Selain itu, ada beberapa hal lain yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di BPS Kabupaten Boalemo.

1.2.1. Potensi

Dari permasalahan dalam menghasilkan kualitas data tersebut, dipetakan beberapa potensi yang dimiliki BPS dalam rangka mewujudkan Renstra BPS, antara lain :

1. BPS merupakan instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensinya, diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - b. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
 - d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
 - e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi yang dimiliki BPS dalam hal tersebut diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

2. Berdasarkan struktur kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan instansi vertikal penyelenggara tugas dan fungsi BPS di daerah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
4. Tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap data dan pelayanan BPS yang diidentifikasi melalui kegiatan Survei Kebutuhan Data Tahun 2019 menyatakan bahwa secara umum, konsumen merasa puas terhadap kualitas data yang diperoleh dari PST di Kabupaten Boalemo yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 100 persen, dan sebagian besar konsumen pun merasa puas dengan pelayanan di PST BPS Kabupaten Boalemo, yang ditunjukkan dengan persentase kepuasan sebesar 90 persen. Hal ini dapat menjadi potensi yang menguntungkan bagi BPS sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, karena kepuasan konsumen merupakan indikator utama dalam mengukur capaian kinerja BPS untuk menghasilkan dan menyediakan data statistik yang berkualitas. Komitmen BPS untuk meningkatkan kepuasan konsumen terhadap penyediaan data dan statistik berkualitas tercermin dalam Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2019 tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp 0 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas penerimaan PNBP yang berlaku pada BPS, sebagai salah satu bentuk pelayanan prima BPS terhadap pengguna (konsumen) data.

5. Adanya potensi dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan BPS untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* dalam proses pengumpulan data akan menjadikan survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, penggunaan *mobile applications* pada kegiatan diseminasi data akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun. Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.
6. *Sustainable Development Goals* (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Boalemo. BPS Kabupaten Boalemo memiliki peran di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's. BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Sehingga, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.
7. Hasil pendataan Susenas menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan penduduk Kabupaten Boalemo yang memanfaatkan internet. BPS Kabupaten Boalemo memanfaatkan peluang potensi tersebut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan media sosial online untuk diseminasi data dalam bentuk infografis dan beragam dokumentasi kegiatan statistik di BPS Kabupaten Boalemo. Selain melalui media online, BPS Kabupaten Boalemo juga memanfaatkan peluang penyebaranluasan data statistik melalui media tulisan dengan mendorong pegawai untuk menulis di koran daerah. Dengan adanya pemanfaatan beragam jenis media informasi tersebut, masyarakat berpeluang untuk lebih memahami data dan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Boalemo.

1.2.2. Permasalahan

BPS Kabupaten Boalemo telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang perlu diatasi selama periode renstra 2020-2024. Permasalahan yang terjadi dapat bersumber internal/dari dalam organisasi dan permasalahan eksternal/ancaman. Seluruh permasalahan tersebut perlu disikapi dengan respon yang tepat agar peran BPS Kabupaten Boalemo sebagai pelopor data terpercaya semakin meningkat dikalangan responden, masyarakat umum, maupun pengguna data. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Kebutuhan pengguna data terhadap beraneka ragam jenis data semakin meningkat. Selain itu, pengguna data juga menginginkan agar data tersedia lebih cepat (*faster*) dan diperoleh lebih mudah (*easier*). Dalam hal ini, terkadang terdapat pengguna data yang kurang memahami cakupan data yang dihasilkan oleh BPS sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997. Pengguna data juga kurang mengetahui waktu rilis yang telah ditentukan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu strategi baru untuk mensosialisasikan informasi mengenai data yang ada BPS.
2. Dalam hal pengumpulan data, responden yang sudah jenuh dalam proses pencacahan merupakan suatu permasalahan yang seringkali terjadi. Hal ini disebabkan banyaknya kegiatan statistik yang dilakukan berulang-ulang dengan responden yang sama. Padahal keakuratan pengakuan dari responden sebagai sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Boalemo dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.
3. Pemenuhan kebutuhan data harus didahului dengan pengumpulan data yang dilaksanakan secara tepat waktu. BPS Kabupaten Boalemo selalu berupaya untuk memenuhi hal tersebut dengan berusaha menyelesaikan kegiatan statistik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Untuk mengefisienkan waktu, seringkali petugas membuat kesepakatan waktu pendataan dengan sumber data/responden. Namun demikian, terdapat beberapa wilayah tidak memiliki jaringan komunikasi yang baik. Sehingga hal ini cukup menghambat proses pengumpulan data yang

efisien, terutama jika wilayah tersebut sulit dijangkau dari kantor BPS Kabupaten Boalemo.

4. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Boalemo mengalami kekurangan jumlah petugas statistik khususnya Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Jumlah KSK yang tersedia saat ini kurang dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Boalemo. Permasalahan ini menyebabkan seringnya tumpah tindih antara kegiatan statistik yang satu dengan yang lainnya sehingga pekerjaan pegawai KSK cenderung melebihi kapasitasnya.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan statistik yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Boalemo, faktor sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap kualitas data statistik yang dihasilkan. Potensi adanya permasalahan kurangnya kapasitas sumber daya manusia berusaha ditanggulangi dengan upaya antara lain berbagai pelatihan/briefing untuk setiap kegiatan, *capacity building*, dan *sharing knowledge* yang dikemas dengan berbagai metode serta konten yang menarik dan lain sebagainya. Selain itu, juga dianjurkan kepada pegawai untuk meningkatkan kapasitas ilmu melalui beragam kursus online terkait teknis maupun non teknis yang dapat diakses melalui media daring. Berbagai hal yang telah ditempuh tersebut bertujuan untuk menjawab, melengkapi, dan menyelesaikan berbagai kendala dan permasalahan terkait SDM antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Kabupaten Boalemo saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi lowong (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Kabupaten Boalemo masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang tepat untuk dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

BADAN PUSAT STATISTIK

2.1 VISI BPS KABUPATEN BOALEMO

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan presiden nomor 18 Tahun 2020 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Dalam melaksanakan RPJMN 2020 – 2024 serta seluruh visi, misi, arahan, dan agenda pembangunan presiden dan wakil presiden, BPS berupaya meningkatkan kontribusi dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik. Pembangunan kabupaten di bidang statistik disesuaikan dengan target pembangunan nasional agar mampu mengakomodir berbagai tantangan yang berkembang, antara lain:

1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil;
2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan
3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan misi pembangunan nasional, capaian kinerja, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, BPS Kabupaten Boalemo berpedoman pada visi BPS menetapkan visi tahun 2020 – 2024, yaitu:

“Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-
undangan dalam mewujudkan BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk
Indonesia Maju”

Dalam visi yang baru tersebut, BPS berperan dalam menghasilkan data statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya untuk

mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik terpercaya. Visi tersebut juga semakin memperkuat peran BPS sebagai pembina data statistik.

2.2 MISI BPS KABUPATEN BOALEMO

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing), dan yang ke 3 Pembangunan Berkeadilan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menyediakan Statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan Internasional
2. Membina K/L/D melalui Sistem Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang Statistik untuk terwujudnya sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme dan amanah

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut.

VISI BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024	Melaksanakan tugas	MISI BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024
	pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang- undangan dalam mewujudkan BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Uraian penjelasan dalam misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar Nasional dan Internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi. Untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187). Ada enam dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan
Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia
3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan

4. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah

Profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

Integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

Amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 TUJUAN BPS KABUPATEN BOALEMO

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam

pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerjasama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 2007.

Tabel 1. Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024

Visi BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024	Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di kabupaten/kota dalam mewujudkan BPS sebagai Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju	Misi BPS Kabupaten Boalemo 2020-2024
		Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 	

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Boalemo untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Kabupaten Boalemo pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:
Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama, pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change And Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN, sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan

kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu Pengembangan sumber daya manusia.

2.4 SASARAN STRATEGIS BPS KABUPATEN BOALEMO

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya *outcome/impact* dari satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS tahun 2020-2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *Money follow program*, artinya seluruh program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS 2020-2024 termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan *outcome* dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementerian/Lembaga, maupun antar Kementerian/Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS terdiri dari: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan-

pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - ii. Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - i. Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - ii. Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - iii. Sosialisasi kepada masyarakat
 - iv. Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - v. Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - vi. Membuat *customs relationship management*
 - vii. Menyusun *data mining* pengguna data
 - viii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data
 - ix. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - x. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - i. Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS

- ii. Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - iii. Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - iv. Jumlah satker yang menerapkan *Smart Office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - v. Dokumen *grand design Smart Office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- i. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - ii. Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - iii. Jumlah MoU atau kerja sama BPS dengan internasional
 - iv. Jumlah NSO yang menerima statistika *capacity Building* di BPS
 - v. Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas, dengan indikator:
- i. Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - ii. Indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah:

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *Monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *Monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah:

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran:

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana prasarana pelayanan BPS

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS. Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kompeten
mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. Efektif
memberikan hasil maksimal,

- c. Efisien
mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. Inovatif
selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. Sistemik
meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dedikasi
memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. Disiplin
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- c. Konsisten
selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. Terbuka
menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. Akuntabel
bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terpercaya
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,

- b. Jujur
melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. Tulus
melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. Adil
menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta;

Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
- ii. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.

2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Pengembangan infrastruktur statistik nasional untuk mendukung SSN;
- b) Penguatan implementasi Sistem Statistik Nasional dengan pemanfaatan infrastruktur statistik nasional; dan
- c) Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- ii. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- iii. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- iv. Membuat customer relationship management;
- v. Menyusun data mining pengguna data;
- vi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data; dan
- vii. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
- b) Penguatan kompetensi pegawai BPS;
- c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan kompetensi pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
- ii. Penguatan fungsi pembina jabatan fungsional.

4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia;

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan

- ii. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.
6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas; Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Division) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality) berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:
- i. Menyusun *quality gates* dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik;
 - ii. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output yang dihasilkan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai enam arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi tiga bidang utama prioritas BPS, yaitu:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), konsisten (koheren), mudah diinterpretasi (*interpretability*) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas karena pemerintah harus mampu

menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan *stakeholder*. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

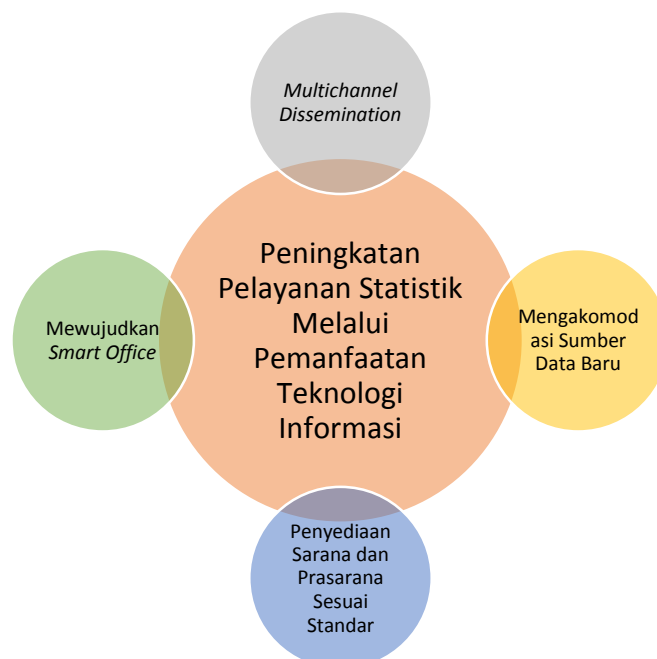
Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang

menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur utama adalah BPS mampu menjadi *strategic enabler* dan *decision support system* (DSS).

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru; meningkatnya pelayanan statistik melalui *multi channel dissemination*; meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.



Gambar 1. Interlink antara Sistem dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya *remapping* dan *reengineering* infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-

2024. *Cross interchange* antara *needs* dan *wants* adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai *tools/enabler*. Namun seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya *tool* dan *enabler* dalam mengakomodir segala kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan *style* bagi *modern office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, “*IT for Function and Solution as empowering achievement*”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *Better, Faster, and Cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable and accountable*.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS di seluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari *Role Model* untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “*role and rule in system and infrastructure*”. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing-masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Meningkatkan akurasi data, melalui:
 - i. Integrasi proses bisnis; serta
 - ii. Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas
- b) Memastikan kemutakhiran data dengan:
 - i. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - ii. Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - iii. Penggunaan *big data* untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- c) Melakukan *risk management* di setiap kegiatan statistik.
- d) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional.
- e) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE.
- f) Menyediakan/membangun sistem rekomendasi kegiatan statistik sektoral.
- g) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral.
- h) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

2. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional
- b) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral
- c) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- d) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK

3. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan *stakeholder* terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN). Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Menyediakan akses data kepada *stakeholder* terhadap SISN
- b) Membina *stakeholder* dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
- b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.

4. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat

- b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Penerapan pengembangan SDM berdasar *Human Capital Development Planning* (HCDP) yang terpadu dan dinamis
 - ii. Penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA)
 - iii. Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai
- c) Perbaikan sistem perencanaan karir, mutasi dan rotasi yang baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut yaitu:
 - i. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai
 - ii. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
 - iii. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM
 - iv. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - v. Pencapaian karir individu berbasis kinerja (*merit system*)
 - vi. Penyediaan jalur karir yang disusun dari *job family*
 - vii. *Talent pool* untuk suksesi organisasi
- d) Penguatan fungsi pembina jabatan fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - ii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
- e) Pemanfaatan operation management system untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut yaitu;
 - i. Menyesuaikan standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data saintis dan IT profesional)
 - ii. Menyesuaikan standar sarana dan prasarana dengan peraturan yang berlaku
- f) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- g) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu

mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.

- h) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran untuk mencapai output yang telah ditetapkan.
 - ii. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
- i) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima
 - ii. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai
- j) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan
 - ii. Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan
 - iii. Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem
- k) Perwujudan smart office di BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. Merumuskan *grand design smart office*
 - ii. Implementasi *smart office* di BPS

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil *trilateral meeting* restrukturisasi anggaran, terdiri dari:

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- a) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;

- b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- i. Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- ii. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- iii. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- iv. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- v. Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- vi. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
- vii. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- viii. Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- ix. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- x. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- xi. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program dukungan manajemen yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program teknis (PPIS) ini terdiri dari:

- i. Pengembangan dan Analisis Statistik;
- ii. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- iii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;

- iv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- v. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- vi. Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- vii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- viii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- ix. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- x. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- xi. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- xii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- xiii. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- xiv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- xv. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

3.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

- a) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
PB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar pembangunan

yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan serta hukum dan tata kelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Perpres no 59 tahun 2017, posisi BPS sama dengan K/L lain yaitu instansi penyedia data sedangkan BPS secara umum ada tugas sebagai pembina statistik, jika peran itu dijalankan maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b) Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- i. memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- ii. memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan;
- iii. memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS;
- iv. menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada

penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada *Framework for Cultural Statistics* (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu juga untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals – SDGs* (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik *tangible* (benda) maupun *intangible* (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Beberapa di antaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d) Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan *big data*.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (*value*) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti *big data*, *mobile computing*, *artificial intelligence*, dan *Internet of Things*, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

3.1.5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 atau disingkat Covid-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka presiden menetapkan Keppres 12/2020 tanggal 13 April 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. ditindaklanjuti dengan pemerintah menerbitkan Keppres 7/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, yang diperbarui dengan Keppres 9/2020 tanggal 20 Maret 2020 Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Inpres 4/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran KL, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlu dilakukan perubahan terhadap pola bekerja, belajar dan

beribadah serta penerapan *social distancing* dan *physical distancing* untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam hal mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan *refocusing* anggaran berdasarkan Perpres 54/2020 tanggal 3 April 2020 tentang perubahan postur APBN TA 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE 6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran KL dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42 persen.

Dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

1. Di tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
2. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/telepon.
3. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
4. Menjalankan kegiatan perkantoran secara *virtual*, mulai dari aplikasi kolaborasi, *email*, *chat*, hingga rapat tatap muka secara *online*.
5. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara *online* dari rumah.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS KABUPATEN BOALEMO

Arah kebijakan dan strategi BPS Kabupaten Boalemo untuk tahun 2020 - 2024 secara garis besar berpedoman pada arah kebijakan dan strategi BPS. Perumusan arah kebijakan dan strategi dilakukan dengan memperhatikan potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi oleh BPS Kabupaten Boalemo dalam menjalankan fungsinya selama ini. Secara ringkas, arah kebijakan dan strategi BPS Kabupaten Boalemo tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) pembinaan forum data untuk meningkatkan sinergi sistem statistik di level daerah; dan
- b) pembinaan kemampuan SDM untuk berkomunikasi dengan pihak luar BPS, baik responden maupun pengguna data dan instansi lainnya.

Strategi yang dilakukan:

- i. meningkatkan komunikasi dengan responden;
- ii. memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- iii. merancang customer relationship management;
- iv. meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data;
- v. menjaga kontinuitas penyajian data melalui media elektronik; dan
- vi. melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.

2. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) penguatan kompetensi pegawai BPS;
- b) membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan kompetensi pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA); dan
- ii. Penguatan fungsi Subbagian Tata Usaha sebagai sumber informasi tentang jabatan fungsional.

3. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan

- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA BPS KABUPATEN BOALEMO

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS Kabupaten Boalemo menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (*outcome*) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan							
	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	50%	50%	50%	50%	50%	Seksi IPDS
		Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi	7,69	8,33	8,33	8,33	8,33	Seksi Statistik Sosial, Produksi, Distribusi, dan Nerwilis

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		pembangunan nasional						
2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)	0	0	0	0	0	Seksi IPDS
		Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)	33	33,3	33,6	33,9	34,2	Seksi IPDS
3	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN							
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)	0	0	0	0	0	Seksi IPDS
4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi							
	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	62	62,3	62,6	62,9	63,2	Subbagian Tata Usaha
		Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan	95	95,5	96	96,5	97	Subbagian Tata Usaha

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
		prasarana pelayanan BPS (%)						

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, BPS memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan
- b) Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
- c) Progres pengembangan jabatan fungsional baru

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasara pelayanan BPS
- b) Jumlah satker yang menerapkan *smart office*
- c) Dokumen *grand design smart office*

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Sasaran Program (*Outcome*) :

Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional

Sasaran Program (*Outcome*) :

Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral khusus sesuai standar
- b) Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik
- c) Jumlah K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait satu data Indonesia

Sasaran Program (*Outcome*) :

Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan Indikator Kinerja Program adalah persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS yang tertuang dalam Dokumen Renstra BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Indikasi Kebutuhan Pendanaan BPS Kabupaten Boalemo
Tahun 2020 - 2024**

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo	6.027,63	5.157,91	5.008,44	4.782,68	5.050,47
054.01.01 Program Dukungan Manajemen	3.482,11	3.811,83	4.141,44	3.967,06	4.127,74
KEGIATAN 2886: BPS Provinsi/Kabupaten/Kota (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)	3.482,11	3.811,83	4.141,44	3.967,06	4.127,74
054.01.06 Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.050,40	4.433,95	4.817,35	4.614,51	4.801,42
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Statistik)	30,61	32,0	33,16	34,32	35,52
KEGIATAN 2898: Direktorat Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Pengeluaran)	26,37	28,10	30,30	32,63	34,97
KEGIATAN 2899: Direktorat Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Neraca Produksi)	9,06	9,60	10,00	10,45	10,88
KEGIATAN 2900: Direktorat Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)	2,66	2,86	3,00	3,13	3,27
KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)	6,01	7,30	7,50	7,75	7,97

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)	69,78	72,20	74,75	77,37	65,58
KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan, dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi)	45,20	52,10	56,37	60,71	65,06
KEGIATAN 2905: Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)	1.924,08	620,18	93,61	98,86	111,66
KEGIATAN 2906: Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)	237,44	255,80	325,00	276,46	288,19
KEGIATAN 2907: Direktorat Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)	35,59	94,70	54,80	27,97	106,12
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)	15,24	17,30	19,10	20,90	22,71
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik	6,77	7,00	7,26	7,51	7,77

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peternakan Perikanan dan Kehutanan)					
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan)	136,71	146,90	152,16	157,56	163,03

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel target kinerja dan kerangka pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

Renstra BPS Kabupaten Boalemo Tahun 2020 – 2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kabupaten Boalemo untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan BPS.

Renstra BPS Kabupaten Boalemo periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. penyediaan data statistik berkualitas;
2. pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS Kabupaten Boalemo untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Dalam Renstra BPS Kabupaten Boalemo 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Kabupaten Boalemo 2020 – 2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Boalemo. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level

BPS Kabupaten merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kabupaten Boalemo menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kabupaten Boalemo optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Boalemo 2020 – 2024 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN periode 2020 – 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BOALEMO								6.027,63	5.157,91	5.008,44	4.782,68	5.050,47	
	SS 1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Seksi Statistik Sosial, Produksi, Distribusi, Nerwilis, dan IPDS
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)		50	50	50	50	50						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (%)		7,69	8,33	8,33	8,33	8,33						
	SS 2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Seksi IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mampu melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik (%)		0	0	0	0	0						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		33	33,3	33,6	33,9	34,2						
	SS 3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Seksi IPDS
	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (%)		0	0	0	0	0						
	SS 4. SDM Statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											Subbagian Tata Usaha
	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat		62	62,3	62,6	62,9	63,2						
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		95	95,5	96	96,5	97						
PROGRAM 01: Program Dukungan Manajemen								3.482,11	3.811,83	4.141,44	3.967,06	4.127,74	Subbagian Tata Usaha
	Meningkatnya pengelolaan SDM BPS dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase pejabat yang memenuhi standar kompetensi jabatan (%)		55	67	78	80	80						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu (%)		27,3	45,5	50,0	54,5	63,6						
	Progress pengembangan jabatan fungsional baru (%)		0	25	50	75	100						
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja BPS	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB		62	62,3	62,6	62,9	63,2						
	Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB		62	62,3	62,6	62,9	63,2						
	Meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)		95	95,5	96	96,5	97						
KEGIATAN 2886: (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi)								3.482,11	3.811,83	4.141,44	3.967,06	4.127,74	Subbagian Tata Usaha
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana BPS												
	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor = xx unit		0	13	1	0	0		357,50	27,50			

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit		0	1	3	0	0		5,50	10,00			
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit		0	2	0	0	0		50,00				
	Luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan = xx m ²		70	0	0	0	0	344,05					
	Luas pengadaan tanah untuk pembangunan/renovasi gedung dan bangunan = xx m ²		0	0	0	0	0						
Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur BPS serta pembinaan SDM dalam penyelenggaraan kegiatan								25,48					
	Jumlah laporan dukungan manajemen yang tepat waktu		74	73	73	72	72						
Layanan perkantoran								3112,57					
	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan = xx %		100	100	100	100	100						
	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor = xx (%)		100	100	100	100	100						
PROGRAM 06: Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik								2.545,52	1.346,08	867,01	815,62	922,73	Seksi IPDS
	Meningkatnya pemanfaatan data	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	statistik yang berkualitas												
	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)		50	50	50	50	50						
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)		7,69	8,33	8,33	8,33	8,33						
	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar (%)		33	33,3	33,6	33,9	34,2						
	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)		0	0	0	0	0						
	Persentase K/L/D/I yang menandatangani komitmen terkait Satu Data Indonesia (%)		0	0	0	0	0						
	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten											
	Persentase K/L/D/I yang menerima pembinaan statistik dan menerapkan hasil pembinaannya (%)		0	0	0	10	20						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEGIATAN 2896: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan Analisis Statistik)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						0	0	0	0	0	
	Tersedianya data analisis dan pengembangan statistik yang berkualitas												
	Jumlah publikasi/laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu		0	0	0	0	0						
	Jumlah model statistik sosial dan ekonomi		0	0	0	0	0						
	Jumlah release data analisis dan pengembangan statistik yang tepat waktu		0	0	0	0	0						
	Jumlah indikator kesetaraan gender dan pemberdayaan gender yang disusun		0	0	0	0	0						
	Jumlah indikator/data yang terkait sdg yang terdapat pada publikasi		0	0	0	0	0						
	Jumlah kajian penghitungan indikator berbasis metode <i>small area estimation</i> (SAE)		0	0	0	0	0						
	Jumlah kajian pemanfaatan <i>big data</i> untuk mendukung <i>official statistics</i>		0	0	0	0	0						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah kegiatan statistik di <i>subject matter</i> yang telah melaksanakan kegiatan penjaminan statistik (PK) secara mandiri		0	0	0	0	0						
	Menguatnya statistik sektoral K/L/D/I		0	0	0	0	0						
	Jumlah aktivitas pembinaan analisis dan pengembangan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I		0	0	0	0	0						
	Jumlah K/L/D/I yang meminta <i>technical assistance analisis</i> dan pengembangan statistik		0	0	0	0	0						
KEGIATAN 2897: Direktorat Diseminasi Statistik (Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						30,61	32,0	33,16	34,32	35,52	Seksi IPDS
	Meningkatnya koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan SSN							2,01	2,1	2,15	2,23	2,31	
	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun		6	6	6	6	6						
	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang masuk dalam Sirusa		2	2	3	3	4						
	Jumlah instansi/institusi yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik		0	0	0	1	2						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah instansi yang telah menindaklanjuti rekomendasi		0	0	0	0	1						
	Jumlah sosialisasi petunjuk teknis penyusunan metadata ke K/L/D/I		0	0	1	1	1						
	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan							28,60	30,0	31,00	32,09	33,21	
	Jumlah aktivitas layanan langsung terhadap konsumen		36	36	32	32	28						
	Persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS (%)		80	80	85	85	88						
	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website		5.500	6.000	6.000	6.250	6.250						
	Jumlah aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I		0	0	1	1	2						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas layanan		80	80	82	82	85						
	Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) terhadap dimensi kualitas data		80	80	82	82	85						
KEGIATAN 2898: Direktorat Statistik Neraca Pengeluaran (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						26,37	28,10	30,30	32,63	34,97	Seksi Nerwilis
	Tersedianya data neraca pengeluaran yang berkualitas							26,37	28,10	30,30	32,63	34,97	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah publikasi/laporan neraca pengeluaran yang terbit tepat waktu		5	5	5	5	5						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase permintaan data PDB/PDRB menurut pengeluaran yang disetujui (%)		95	95	95	95	95						
KEGIATAN 2899: Direktorat Statistik Neraca Produksi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						9,06	9,60	10,00	10,45	10,88	Seksi Nerwilis
	Tersedianya data neraca produksi yang berkualitas							9,06	9,60	10,00	10,45	10,88	
	Jumlah publikasi/laporan neraca produksi yang terbit tepat waktu		1	1	1	1	1						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase permintaan data PDB/PDRB; tabel I-O; dan PDB ekonomi hijau yang disetujui (%)		90	90	90	90	90						
	Persentase lapangan usaha yang menggunakan lembar kerja (LK) penghitungan yang sesuai dengan <i>standard operating procedure</i> (SOP) (%)		80	85	90	100	100						
KEGIATAN 2900: Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						2,66	2,86	3,00	3,13	3,27	Seksi IPDS
	Tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna							2,66	2,86	3,00	3,13	3,27	
	Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS (%)		100	100	100	100	100						
	Jumlah laporan peta desa yang mutakhir		1	1	1	1	1						
	Jumlah peta desa dan blok sensus yang diupdate		84	84	84	84	84						
	Jumlah pembinaan kegiatan statistik (baik dari aspek desain, KBLI, kerangka sampel, maupun pemetaan)		0	0	0	0	1						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	KEGIATAN 2901: Direktorat Sistem Informasi Statistik (Pengembangan Sistem Informasi Statistik)	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						0	0	0	0	0	Seksi IPDS
	Terlaksananya integrasi dan pengolahan data dengan dukungan jaringan komunikasi yang handal							0	0	0	0	0	
	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS pusat tepat waktu (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase <i>uptime</i> layanan jaringan komunikasi (%)		97	97	97	97	97						
	Persentase perbaikan sarana TI yang sesuai dengan <i>service level agreement</i> (%)		100	100	100	100	100						
	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		0	1	3	0	0						
	Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan (%)		100	100	100	100	100						
	KEGIATAN 2902: Direktorat Statistik Distribusi (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi)	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						6,01	7,30	7,50	7,75	7,97	Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya data statistik distribusi yang berkualitas							6,01	7,30	7,50	7,75	7,97	
	Jumlah publikasi/laporan statistik distribusi yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2903: Direktorat Statistik Harga (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga)								69,78	72,20	74,75	77,37	65,58	Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya data statistik harga yang berkualitas							69,78	72,20	74,75	77,37	65,58	
	Jumlah publikasi/laporan statistik harga yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2904: Direktorat Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (Penyediaan dan Pengembangan								45,20	52,10	56,37	60,71	65,06	Seksi Statistik Produksi

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi													
	Tersedianya data statistik industri yang berkualitas							45,20	52,10	56,37	60,71	65,06	
	Jumlah publikasi/laporan statistik industri yang terbit tepat waktu		5	5	5	5	5						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2905 : Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						1.924,08	620,18	93,61	98,86	111,66	Seksi Statistik Sosial
	Tersedianya data statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang berkualitas							1.924,08	620,18	93,61	98,86	111,66	
	Jumlah publikasi/laporan statistik kependudukan dan ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu		5	4	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KEGIATAN 2906 : Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						237,44	255,80	325,00	276,46	288,19	Seksi Statistik Sosial
	Tersedianya data statistik kesejahteraan rakyat yang berkualitas							237,44	255,80	325,00	276,46	288,19	
	Jumlah publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2907: Seksi Statistik Ketahanan Sosial (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial)		Pusat/ Provinsi/ Kabupaten						35,59	94,70	54,80	27,97	106,12	Seksi Statistik Sosial
	Tersedianya data statistik ketahanan sosial yang berkualitas							35,59	94,70	54,80	27,97	106,12	
	Jumlah publikasi/laporan statistik ketahanan sosial yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan		100	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pendekatan non rumah tangga non usaha (%)												
KEGIATAN 2908: Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata)													
	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten							15,24	17,30	19,10	20,90	22,71	Seksi Statistik Distribusi
	Tersedianya data statistik keuangan, teknologi informasi, dan pariwisata yang berkualitas							15,24	17,30	19,10	20,90	22,71	
	Jumlah publikasi/laporan statistik keuangan, TI, dan pariwisata yang terbit tepat waktu		3	3	3	3	3						
	Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2909: Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan)													
	Pusat/ Provinsi/ Kabupaten							6,77	7,00	7,26	7,51	7,77	Seksi Statistik Produksi
	Tersedianya data statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang berkualitas							6,77	7,00	7,26	7,51	7,77	

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah publikasi/laporan statistik peternakan, perikanan, dan kehutanan yang terbit tepat waktu		2	2	2	2	2						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						
KEGIATAN 2910: Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan)								136,71	146,90	152,16	157,56	163,03	Seksi Statistik Produksi
	Tersedianya data statistik tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan yang berkualitas							136,71	146,90	152,16	157,56	163,03	
	Jumlah publikasi/laporan statistik tanaman pangan yang terbit tepat waktu		4	4	4	4	4						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga (%)		100	100	100	100	100						

Program / Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha (%)		100	100	100	100	100						
	Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha (%)		100	100	100	100	100						



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BOALEMO**

Jln. Trans Sulawesi Desa Lamu Kecamatan Tilamuta

Telp: 0811437501

Homepage: <https://boalemokab.bps.go.id/>

E-mail: bps7501@bps.go.id